



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BATAM



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



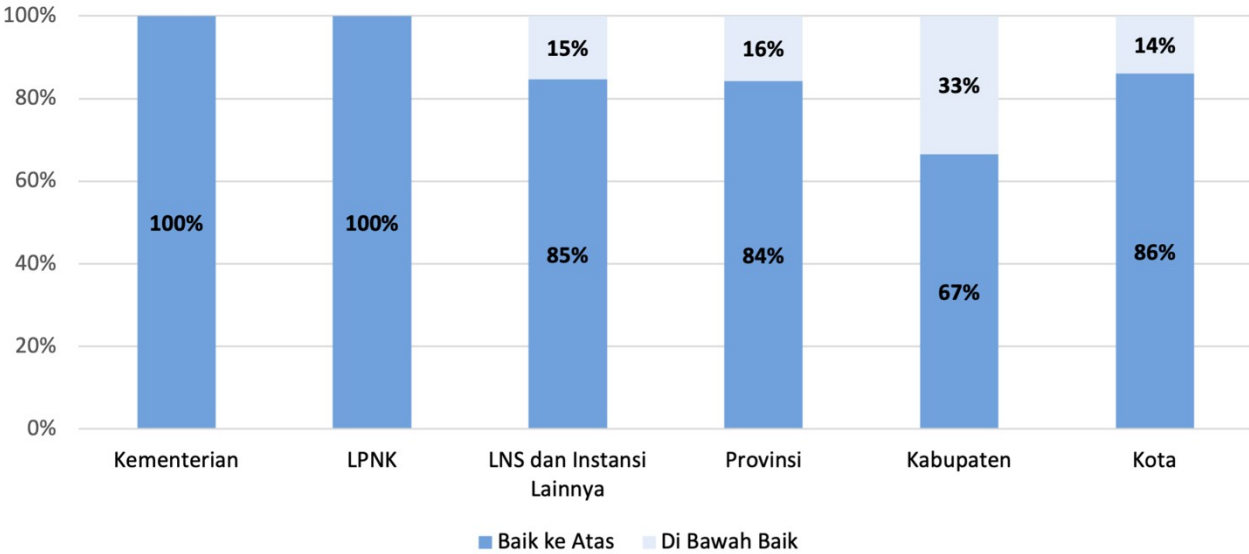
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

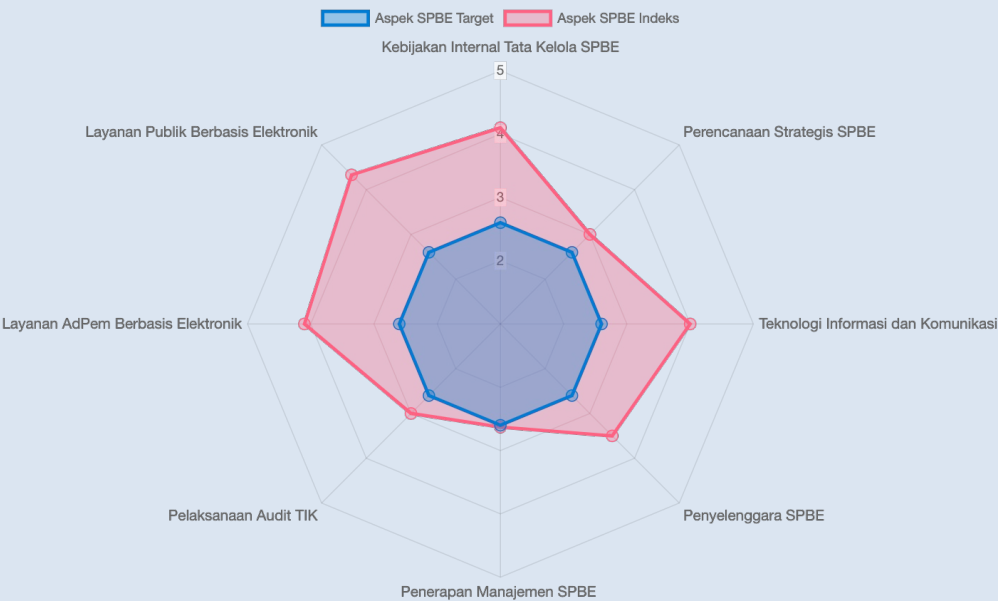
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,77
Domain Kebijakan SPBE	4,10
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,10
Domain Tata Kelola SPBE	3,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,50
Domain Manajemen SPBE	2,73
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,63
<i>Audit TIK</i>	3,00
Domain Layanan SPBE	4,19
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,10
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi dan Kebijakan Internal Audit TIK menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Batam. Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data dibuktikan dengan adanya PERWAKO_NO_40_TAHUN_2021 tentang PENYELENGGARAAN_SPBE_BATAM yang dilakukan review dan ditindaklanjuti dengan kebijakan baru PERWAKO BATAM NOMOR 67 TAHUN 2023 SPBE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM. Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK dibuktikan dengan adanya kebijakan PERWAKO BATAM NOMOR 67 TAHUN 2023 SPBE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM yang telah dilakukan review sesuai NOTULEN_RAPAT_KOORDINASI_EVALUASI_SPBE_TH_2023
- **Kelemahan**
Belum Memiliki Kelemahan Pada Aspek Ini

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam adalah dengan adanya Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE

- **Kekuatan**
Belum Memiliki Kekuatan Pada Aspek Ini
- **Kelemahan**
Belum Memiliki Kelemahan Pada Aspek Ini

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra

- **Kekuatan**
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Batam. Pembangunan Aplikasi SPBE dibuktikan dengan adanya dokumentasi Konsultasi Kepada Unit Pengelola TIK, kemudian terdapat dokumentasi pengendalian dan review dan dokumentasi optimalisasi aplikasi sesuai. Layanan Pusat Data dibuktikan dengan adanya dokumen Topologi Jaringan, dokumen OPD – OPD yang terhubung jaringan, dokumen interkoneksi dengan PDN, dokumen Review Layanan Pusat Data. Layanan Jaringan Intra dibuktikan dengan adanya dokumen Topologi Jaringan, dokumen OPD yang terhubung jaringan, dokumen interkoneksi dengan PDN, dokumen Review sesuai data dukung
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Pemerintah Kota Batam belum memenuhi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan dimana belum nampak penerapan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, penerapan hanya ada 3 OPD sesuai dokumen.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Batam. Dibuktikan dengan adanya dokumentasi tim koordinasi SPBE yang telah diformalkan, terdapat koordinasi dengan unit kerja dan terdapat dokumen review tugas kerja tim koordinasi
- Kelemahan
Belum Memiliki Kelemahan Pada Aspek Ini

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan
Belum Memiliki Kekuatan Pada Aspek Ini
- Kelemahan
Namun disisi lain, Pemerintah Kota Batam masih belum memenuhi Penerapan Manajemen Data, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Penerapan Manajemen Data dimana belum adanya dokumen pedoman Manajemen Data. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dimana ditemukan dokumen Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki belum nampak pemenuhan terhadap seluruh kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penerapan Manajemen Perubahan dimana terdapat dokumen Manajemen Perubahan namun belum nampak pemenuhan serangkaian proses manajemen Perubahan mulai dari perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

- Kekuatan
Belum Memiliki Kekuatan Pada Aspek Ini
- Kelemahan
Belum Memiliki Kelemahan Pada Aspek Ini

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Batam. Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran dan Layanan Keuangan dibuktikan dengan adanya dokumen penggunaan aplikasi berbagi pakai SIPD. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dibuktikan dengan adanya dokumen penggunaan aplikasi berbagi pakai LPSE. Layanan Kepegawaian dibuktikan dengan adanya dokumen layanan aplikasi simpeg.batam.go.id yang memiliki fitur fungsionalitas interaksi, transaksi sesuai dan terdapat layanan integrasi menggunakan API milik SIASN dan e-Sign TTE. Layanan Kearsipan Dinamis dibuktikan dengan adanya dokumen penggunaan aplikasi berbagi pakai SRIKANDI. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dibuktikan dengan aplikasi e-monev (emonev.batam.go.id) memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data. nampak layanan API yang disediakan. Layanan Kinerja Pegawai dibuktikan dengan adanya dokumen penggunaan aplikasi <https://simpeg.batam.go.id/kinerja> dimana mempunyai fungsi pengguna dapat mengunduh atau

mengunggah informasi, dan terdapat transaksi serta validasi. aplikasi menyediakan layanan API dan menggunakan API layanan lainnya.

- Kelemahan
Belum Memiliki Kelemahan Pada Aspek Ini

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 3 yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Batam. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dibuktikan dengan adanya dokumen penggunaan aplikasi SPAN LAPOR yang memberikan layanan transaksi, layanan kolaborasi dan telah dilakukan reuiu. Layanan Data Terbuka dibuktikan dengan adanya Aplikasi Satu Data <https://satudata.batam.go.id/web/>, dimana terdapat dokumen fungsionalitas aplikasi seperti pencarian, transaksi dan integrasi dengan API. Aplikasi dilakukan reuiu dan dilakukan tindak lanjut optimasi sesuai reuiu. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibuktikan dengan adanya aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang menyediakan layanan interaksi, transaksi berupa validasi dokumen yang diunggah serta sudah terintegrasi dengan JDIHN. Layanan Publik Sektor 1 dibuktikan dengan adanya aplikasi perizinan online pada Dinas PM dan PTSP dimana menyediakan layanan interaksi publik terkait layanan informasi publik yang difasilitasi dengan fitur pencarian informasi, pengunduhan dan pengunggahan dokumen serta validasi. Terdapat layanan api yang disediakan dan dilakukan review serta tindaklanjut perbaikan aplikasi. Layanan Publik Sektor 3 dibuktikan dengan adanya aplikasi eGovernment (<https://egov.batam.go.id/web/>) yang menyediakan layanan interaksi publik terkait layanan informasi publik yang di fasilitasi dengan fitur pencarian informasi, pengunduhan dan pengunggahan dokumen serta validasi. Aplikasi memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain. Layanan termasuk dalam kategori RB Tematik terkait Akselerasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.
- Kelemahan
Belum Memiliki Kelemahan Pada Aspek Ini

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kota Batam. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kota Batam, sudah dapat menggambarkan predikat Sangat Baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Kebijakan Tata Kelola melalui PERWAKO_NO__40_TAHUN_2021 tentang PENYELENGGARAAN_SPBE_BATAM yang telah memuat pengaturan mengenai referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE lengkap, mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap, mengatur seluruh rangkaian proses manajemen data secara lengkap serta telah dilakukan review regulasi dengan notulensi dan tindak lanjut berupa kebijakan baru PERWAKO BATAM NOMOR 67 TAHUN 2023 SPBE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM. Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembangunan Aplikasi SPBE memiliki dokumentasi Konsultasi Kepada Unit Pengelola TIK, kemudian terdapat dokumentasi pengendalian dan review dan dokumentasi optimalisasi aplikasi sesuai. Layanan Pusat Data dibuktikan dengan adanya dokumen Topologi Jaringan, dokumen OPD yang terhubung jaringan, dokumen interkoneksi dengan PDN, dokumen Review sesuai data dukung Pada Layanan Jaringan Intra terdapat Dokumen SOP Layanan Jaringan Intra Pemerintah dan penerapan jaringan intra pada perangkat daerah serta interkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah lain atau jaringan intra nasional. Pada Aspek Penyelenggara SPBE dibuktikan dengan adanya dokumentasi tim koordinasi SPBE yang telah diformalkan, terdapat koordinasi dengan unit kerja dan terdapat dokumen review tugas kerja tim koordinasi. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran dan Layanan Keuangan menerapkan aplikasi berbagi pakai SIPD. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan aplikasi berbagi pakai LPSE. Layanan Kepegawaian menggunakan layanan aplikasi simpeg.batam.go.id yang telah terintegrasi dengan SIASN. Layanan Kearsipan Dinamis menggunakan aplikasi berbagi pakai SRIKANDI. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi e-monev (emonev.batam.go.id) yang telah terintegrasi. Layanan Kinerja Pegawai dibuktikan dengan adanya dokumen penggunaan aplikasi <https://simpeg.batam.go.id/kinerja> dimana mempunyai fungsi pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi, dan terdapat transaksi serta validasi. aplikasi menyediakan layanan API dan menggunakan API layanan lainnya. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik menggunakan aplikasi SPAN LAPOR yang memberikan layanan transaksi, layanan kolaborasi. Layanan Data Terbuka menggunakan Aplikasi Satu Data <https://satudata.batam.go.id/web/>, dimana terdapat dokumen fungsionalitas aplikasi seperti pencarian, transaksi dan integrasi dengan API. Aplikasi dilakukan reuiv dan dilakukan tindak lanjut optimasi sesuai reuiu. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menggunakan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang menyediakan layanan interaksi, transaksi berupa validasi dokumen yang diunggah serta sudah terintegrasi dengan JDIHN. Layanan Publik Sektor 1 menggunakan aplikasi perizinan online pada Dinas PM dan PTSP dimana menyediakan layanan interaksi publik terkait layanan informasi publik yang difasilitasi dengan fitur pencarian informasi, pengunduhan dan pengunggahan dokumen serta validasi. Terdapat layanan api yang disediakan dan dilakukan review serta tindak lanjut perbaikan aplikasi. Layanan Publik Sektor 3 menerapkan aplikasi eGovernment (<https://egov.batam.go.id/web/>) yang menyediakan layanan interaksi publik terkait layanan informasi publik yang di fasilitasi dengan fitur pencarian informasi, pengunduhan dan pengunggahan dokumen serta validasi. Aplikasi memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain. Layanan termasuk dalam kategori RB Tematik terkait Akselerasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Batam masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada Aspek Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penerapan Manajemen SPBE. Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Kota Batam masih belum nampak penerapan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, penerapan hanya ada 3 OPD sesuai dokumen. Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Penerapan Manajemen Data dimana belum adanya dokumen pedoman Manajemen Data. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dimana ditemukan dokumen Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki belum nampak pemenuhan terhadap seluruh kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penerapan Manajemen Perubahan dimana terdapat dokumen Manajemen Perubahan namun belum nampak pemenuhan serangkaian proses manajemen Perubahan mulai dari perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlunya pemanfaatan penerapan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan di lingkungan Pemerintah Kota Batam pada seluruh OPD. Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang tingkat kematangannya masih rendah, perlu disusun pedoman yang komprehensif terkait manajemen dan pelaksanaannya, sehingga penerapan manajemen lebih terarah. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024